

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

a. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Di sektor privat (swasta), laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan / SAK (2007) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Sedangkan disektor publik, khususnya di lingkungan pemerintahan, laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan /PSAP 01 paragraf 17, merupakan laporan yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban antitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Entitas pelaporan menyajikan

informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *ouput* entitas dan *outcomes* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

b. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Di dalam PSAP 01 paragraf 14 disebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non

anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi yang lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 232 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi :

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Neraca;
- c) Laporan Arus Kas dan
- d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya di dalam ayat (6) pada pasal yang sama disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan meliputi ;

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Neraca;
- c) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Peranan Dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Di sektor publik, laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah / SAP (2005) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan dalam lingkungan organisasi sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam penyediaan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik.

Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut :

- a. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*).

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa

pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.

c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

d. Kelangsungan organisasi (*Viability*) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

e. Hubungan masyarakat (*Public Relations*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

f. Sumber fakta dan gambaran (*Source of Fact and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan laporan keuangan menurut SAP yang tertuang di dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- (a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

d. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan Pemerintah

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas dan asumsi keterukuran dalam satuan uang.

e. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan

mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

f. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

g. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

h. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan adalah informasi yang memenuhi karakteristik berikut:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya

atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang Semarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

i. Prinsip – Prinsip Pelaporan Keuangan

Prinsip pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah:

a. Prinsip nilai historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

b. Prinsip realisasi;

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip mempertandingan biaya-pendapatan dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

c. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan

aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Prinsip periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

e. Prinsip konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Prinsip pengungkapan lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada halaman depan laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip penyajian wajar.

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

j. Basis Akuntansi

Selain prinsip-prinsip pelaporan keuangan tersebut di atas, terdapat satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaporan keuangan, yaitu masalah penggunaan basis akuntansi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran (baik lebih atau kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas

k. Pengguna Laporan Sektor Publik

Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan bergantung kepada kepentingan atau jenis keputusan yang akan diambil oleh pengguna tersebut. Adanya perbedaan kepentingan dalam pengambilan keputusan tersebut maka pengguna laporan keuangan dibedakan menjadi

pengguna internal dan pengguna eksternal (Kieso : 2007). Di sektor bisnis, pengguna internal adalah manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan. Terdapat beberapa jenis pengguna eksternal, investor (pemilik), kreditor, Badan Perpajakan, Badan-badan pembuat peraturan, pelanggan, serikat pekerja dan perencana ekonomi.

Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik (Deddy Nordiawan : 2006) dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik

Borgonovi dan Anessi Pessina (1997) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik sebagai berikut :

- a. Masyarakat pengguna jasa publik.
- b. Masyarakat pembayar pajak.
- c. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi.
- d. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah.
- e. Badan-badan internasional.
- f. Investor asing dan analis negara (*country analys*)
- g. Generasi yang akan datang.
- h. Lembaga Negara.
- i. Kelompok politik.
- j. Manajer publik.
- k. Pegawai pemerintah.

Sementara Governmental Accounting Standard Board (GASB) mengidentifikasi pengguna laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

- a) Masyarakat yang kepadanya Pemerintah bertanggungjawab.
- b) Legislatif dan Badan Pengawas yang secara langsung mewakili rakyat.
- c) Investor dan kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.

Kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah meliputi: lembaga pemerintah, investor dan kreditor, penyedia sumber daya, badan pengawas, dan konstituen (Mardiasmo, 2007). Pengelompokan yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Bastian (2001) yaitu: legislatif dan manajemen pemerintah, masyarakat, investor dan kreditor, institusi internasional, pengamat, dan aparat pemerintah.

Di Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

- (a) masyarakat;
- (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- (d) pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Sejalan dengan tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, maka manajemen pemerintahan daerah (sektor publik) harus memberikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan (sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah) meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, setiap pejabat yang menyajikan Laporan Keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang bersangkutan.

Sebelum disampaikan kepada DPRD, laporan keuangan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dilampiri informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, kemudian diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dengan dan disetujui oleh DPRD. Selain legislatif, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah masyarakat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.

I. Pengertian Laporan Arus Kas

Laporan aliran/ arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan lainnya seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan surplus/defisit, dan lain-lain, yang sangat bermanfaat bagi para pengambil keputusan baik intern/ekstern suatu entitas tertentu.

Menurut Halim (2007 : 90) Laporan Arus Kas adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama suatu periode akuntansi dan saldo kas termasuk setara kas pada tanggal pelaporan. Sedangkan menurut Mahmudi (2007 : 171) Laporan Arus Kas sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran tentang mutasi kas akibat dari aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Bastian (2006: 380) bahwa Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 85 bahwa laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas serta setara kas pada tanggal pelaporan. Dari beberapa pengertian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai saldo kas pada awal periode, arus kas masuk dan arus kas keluar dalam satu periode,

m. Manfaat Informasi Laporan Arus Kas

Di dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 03 Laporan Arus Kas paragraf 5 disebutkan bahwa Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Paragraf 6 menyebutkan bahwa laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Selanjutnya paragraf 7 menyatakan bahwa apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas

Menurut Mahmudi (2007:173) manfaat laporan arus kas, antara lain :

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- b. Untuk memprediksi kemampuan fiskal pemerintah daerah di masa datang.
- c. Untuk memprediksi kesenimbangan fiskal pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik.

n. Entitas Pelaporan Arus Kas

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah dan Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika

menurut peraturan perundangan-undangan satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi bendaharawan. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau kuasa bendahara umum negara/daerah. Kenaikan/penurunan kas dan saldo kas pada akhir periode.

o. Penyajian Laporan Arus Kas

Menurut Mahmudi (2007:173) bahwa Laporan Arus Kas diklasifikasikan dalam empat komponen aktivitas yaitu 1) aktivitas operasi, 2) aktivitas investasi aset nonkeuangan, 3) aktivitas pendanaan dan 4) aktivitas non anggaran. Masing-masing aktivitas dilaporkan arus masuk dan arus keluar kasnya sehingga diperoleh informasi tentang arus kas bersih dari tiap aktivitas. Arus kas bersih dari setiap aktivitas kemudian dijumlahkan sehingga diketahui kenaikan atau penurunan kas bersih selama satu periode akuntansi. Saldo akhir kas yang dilaporkan di laporan arus kas diperoleh dari penjumlahan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan atau penurunan kas.

Adapun paragraf 14 PSAP Nomor 03 Laporan Arus Kas menyebutkan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas nonanggaran.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas nonanggaran memberikan

informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas nonanggaran.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas misalnya transaksi utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran utang bunga akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

1. Aktifitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :

- a. Penerimaan Perpajakan
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c. Penerimaan Hibah
- d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya

e. Tranfer masuk

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Bunga
- d. Subsidi
- e. Hibah
- f. Bantuan Sosial
- g. Belanja Lain-lain/Tak terduga
- h. Transfer keluar

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

2. Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas brutto

dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas dari investasi aset non keuangan terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.

3. Aktifitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas brutto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. :

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antar lain :

- a. Penerimaan Pinjaman
- b. Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara
- c. Penerimaan dari Investasi
- d. Penerimaan Kembali Pinjaman
- e. Pencairan Dana Cendangan

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan meliputi :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah
- b. Pembayaran Pokok Pinjaman
- c. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang
- d. Pembentukan Dana Cendangan

4. Aktifitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas brutto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah

Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk, sedangkan arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

p. **Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi Aset Nonkeuangan, Pendanaan Dan Nonanggaran**

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pendanaan dan nonanggaran. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:

1. Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

2. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini surplus/defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*)

penerimaan kas atau pembayaran yang lalu atau yang akan datang serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi nonkeuangan dan pembiayaan.

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 03 Laporan Arus Kas paragraf 34 menyebutkan bahwa entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang
- b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan, dan
- c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Format laporan arus kas Pemerintah Kabupaten/Kota metode langsung berdasarkan lampiran Vc Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	Xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daeah	Xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Xxx	xxx
6	Lain - lain PAD yang sah	Xxx	xxx
7	Dana Bagi hasil Hasil Pajak	Xxx	xxx
8	Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	Xxx	xxx
9	Dana Alokasi Umum	Xxx	xxx
10	Dana Alokasi Khusus	Xxx	xxx
11	Dana Otonomi Khusus	Xxx	xxx
12	Dana Penyesuaian	Xxx	xxx
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Xxx	xxx
14	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	Xxx	xxx
15	Pendapatan Hibah	Xxx	xxx
16	Pendapatan Dana Darurat	Xxx	xxx
17	Pendapatan Lainnya	Xxx	xxx
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	Xxx	xxx
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai	Xxx	xxx
21	Belanja Barang	Xxx	xxx
22	Bunga	Xxx	xxx
23	Subsidi	Xxx	xxx
24	Hibah	Xxx	xxx
25	Bantuan Sosial	Xxx	xxx
26	Belanja Tak terduga	Xxx	xxx
27	Bagi hasil Pajak	Xxx	xxx
28	Bagi hasil Retribusi	Xxx	xxx
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Xxx	xxx
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)	Xxx	xxx
31	Arus Kas bersih dari aktivitas Operasi (18-30)	Xxx	xxx
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	Xxx	xxx
35	Pendapatan Penjualan atas peralatan dan mesin	Xxx	xxx
36	Pendapatan penjualan atas gedung dan Bangunan	Xxx	xxx
37	Pendapatan atas penjualan jalan . Irigasi dan jaringan	Xxx	xxx
38	Pendapatan dari Penjualan Aset tetap Lainnya	Xxx	xxx
39	Penjualan dari Penjualan Aset Lainnya	Xxx	xxx

40	Jumlah Arus masuk Kas (34 s/d 39)	Xxx	xxx
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah	Xxx	xxx
43	Belanja Peralatan dan Mesin	Xxx	xxx
44	Belanja Gedung dan Bangunan	Xxx	xxx
45	Belanja Jalan , Irigasi dan Jaringan	Xxx	xxx
46	Belanja Aset Tetap lainnya	Xxx	xxx
47	Belanja aset lainnya	Xxx	xxx
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	Xxx	xxx
49	Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)	Xxx	xxx
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Pencairan dana Cadangan	Xxx	xxx
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Xxx	xxx
54	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Xxx	xxx
55	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya	Xxx	xxx
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bank	Xxx	xxx
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	Xxx	xxx
58	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	Xxx	xxx
59	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	Xxx	xxx
60	Penerimaan Kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara	Xxx	xxx
61	Penerimaan Kembali pinjaman kepada Perusahaan Daerah	Xxx	xxx
62	Penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	Xxx	xxx
63	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)	Xxx	xxx
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan	Xxx	xxx
66	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	Xxx	xxx
67	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Xxx	xxx
68	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya	Xxx	xxx
69	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	Xxx	xxx
70	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	Xxx	xxx
71	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri – Obligasi	Xxx	xxx
72	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri – Lainnya	Xxx	xxx
73	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	Xxx	xxx
74	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	Xxx	xxx
75	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Xxx	xxx
76	Jumlah Arus kas Keluar Kas (65 s/d 75)	Xxx	xxx
77	Arus Kas bersih dari aktivitas Pembiayaan (64 - 76)	Xxx	xxx
78	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran		
79	Arus Masuk kas		
80	Penerimaan Perhitungan pihak ketiga (PFK)	Xxx	xxx
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)	Xxx	xxx

82	Arus Keluar Kas		
83	Penegeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Xxx	xxx
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)	Xxx	xxx
85	Arus Kas Bersih dari aktivitas Non Anggaran (81 - 84)	Xxx	xxx
86	Kenaikan (Penurunan) Kas (31+49+77+85)	Xxx	xxx
87	Saldo Awal Kas di BUD	Xxx	xxx
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)	Xxx	xxx
89	Saldo Akhir Kas dibendahara Pengeluaran	Xxx	xxx
90	Saldo Akhir di Bendahara Penerimaan	Xxx	xxx
88	Saldo Akhir Kas(88 +89 + 90)	Xxx	xxx

Sumber data : PP No. 24 Tahun 2005

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan laporan keuangan arus kas antara lain :

- a. Wiwik Sundari (2003) meneliti laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan air minum kota salatiga. Hasil Penelitian ini bahwa daerah kota salatiga rasio arus kas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan cukup solid. Alat analisis yang digunakan adalah Rasio Likuiditas terdiri dari neraca, Laporan laba rugi dan laporan arus kas tahun 2000.
- b. Geista Harahap 2011 meneliti tentang laporan arus kas sebagai alat efektifitas kinerja keuangan pada PT. Boana Estate cabang Medan. Hasil Penelitian Tingkat likuiditas keuangan PT. Boana Estate cabang Medan di lihat dari rasio likuiditas arus kas 2009 meningkat bila di bandingkan tahun 2008.
- c. Zahra Sauzan Siregar meneliti tentang laporan arus kas dalam menilai kinerja keuangan perusahaan Semen Gersik (Persero). Hasil penelitian ini PT. Semen Gersik (Persero) Tbk yang paling kinerjanya. Alat analisisnya adalah Kinerja keuangan perusahaan yaitu Rasio Laporan Arus Kas

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

